



Analisis Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Arlisa Mustika Noviyati, Rifki Khoirudin*

Universitas Ahmad Dahlan
rifki.khoirudin@ep.uad.ac.id

Abstrak: Optimalisasi aset merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola aset secara efektif dan efisien. Pada dasarnya Barang Milik Daerah (BMD) dapat memberikan nilai ekonomis jika dikelola dengan baik, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Pedoman Pengelolaan BMD tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Lebih lanjut Pemda DIY mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan BMD. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu dapat diketahui optimalisasi aset yang dipengaruhi oleh inventarisasi, legal audit, penilaian, serta pengawasan dan pengendalian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang didapatkan dari pemegang aset BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Teknis analisis yang dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yaitu legal audit serta pengawasan dan pengendalian mempengaruhi optimalisasi aset Pemda DIY. Sedangkan inventarisasi dan penilaian aset tidak mempengaruhi optimalisasi aset Pemda DIY.

Kata kunci: Optimalisasi; Aset; Barang Milik Daerah

*Correspondence: Rifki Khoirudin
Email: rifki.khoirudin@ep.uad.ac.id

Received: 04 Nov 2023
Accepted: 29 Dec 2023
Published: 30 Dec 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Asset optimization is an effort made to manage assets effectively and efficiently. Basically, Regional Property (BMD) can provide economic value if managed properly, then Regional Original Income (PAD) will increase. BMD Management Guidelines are contained in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016. Furthermore, the DIY Regional Government issued Regional Regulation Number 6 of 2018 concerning BMD Management which is used as the basis for implementing BMD management. The purpose of this research is to find out the optimization of assets that are influenced by inventory, legal audit, valuation, and supervision and control. This study uses quantitative methods with primary data obtained from BMD asset holders within the DIY Provincial Government. The technical analysis carried out using multiple linear regression. The results of the study are legal audit and supervision and control affect the optimization of DIY Local Government assets. Meanwhile, asset inventory and valuation do not affect the optimization of DIY local government assets.

Keywords: Optimization; Assets; Regional Property

Pendahuluan

Aset (*Asset*) merupakan barang atau dapat disebut juga *tangible asset* dan *intangible asset*, bergerak dan tidak bergerak dan terdapat dalam aktiva di suatu instansi, organisasi, atau badan usaha, maupun perorangan atau individu (Pratama dan Pangayow, 2016). Barang Milik Daerah (BMD) menjadi asset Pemda dengan wujud bergerak yang dapat dibelanjakan dan tidak bergerak seperti tanah, yang mana kedua wujud tersebut diperoleh secara sah, dikuasai oleh Instansi Pemerintah Daerah dan tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan.

Ketidaktertiban pada pengelolaan data barang atau aset daerah menjadi permasalahan utama yang dihadapi (Jusmin dan Nursalim, 2018). Dalam suatu organisasi aset harus dikelola dengan optimal agar dapat memberikan manfaat dan juga keuntungan. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa barang milik daerah merupakan seluruh aset yang didapatkan dari APBD dan didapatkan dari lain-lain yang dinyatakan sah. Secara implisit, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Oleh karena itu otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menjadi awal dari pemberian keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengurus sendiri daerahnya (Dametouw.dkk, 2016).

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dimana kekuasaan dan wewenang Pemda bertanggung jawab untuk mengontrol serta mengelola sendiri kebutuhan aset pemerintah, maka momentum ini menjadikan salah satu ruang untuk pemda mengoptimalkan penggunaan aset yang dimilikinya untuk kebutuhan masyarakat setempat dan kebutuhan tersebut dapat bersumber dari aspirasi masyarakat sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Antoh, 2017). Pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) sejak 1 Januari 2001 telah membawa dampak yang positif paling tidak dari sudut peningkatan sikap kemandirian daerah, yaitu mendorong Pemerintah Daerah untuk berusaha menggali sumber-sumber penerimaan daerah (Wahyuni & Khoirudin, 2015). Pemerintah Daerah akan mendominasi dalam urusan Pemerintahannya namun tetap harus bertanggung jawab terhadap Pemerintah Pusat. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah yaitu dapat memanfaatkan dengan maksimal kekayaan yang dipunya oleh Pemda dengan cara mengoptimalkan aset atau BMD yang dimiliki. Seperti diketahui bersama, sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (Nasution, dkk, 2015). Pemda harus mengetahui cara yang harus digunakan agar mampu memanfaatkan aset yang dipunya untuk meningkatkan PAD. Karna diketahui bahwa optimalisasi aset atau BMD mampu meningkatkan PAD.

Pengelolaan aset di Pemerintah Daerah belum optimal disebabkan karena minimnya pengetahuan mengenai manajemen aset (Widiantri & Jayantiari, 2017). Salah satu sasaran atau tujuan pengelolaan aset daerah adalah terjadinya optimalisasi dalam hal pemanfaatan aset daerah sehingga aset yang ada dapat digunakan sebesar-besarnya untuk pelayanan kepada masyarakat (Asman, Akram, & Alamsyah, 2016). Optimalisasi aset merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola aset secara efektif dan efisien, karena pada dasarnya aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) dapat memberikan nilai ekonomis jika dikelola dengan baik. Jika pengelolaan aset Pemerintah Daerah optimal maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bertambah. Pengelolaan BMD diatur pada Undang-Undang Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu Pemda DIY juga mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan BMD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna serta mampu melakukan optimalisasi

sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan pemanfaatan dari aset-aset yang ada (Jamaludin, 2017).

Menurut Pratama & Pangayow (2016), menyatakan bahwa di Pemda Kota Jayapura variabel legal audit, penilaian terhadap aset, pengawasan dan pengendalian aset memberikan pengaruh terhadap optimalisasi aset. Sedangkan inventarisasi aset tidak mempengaruhi optimalisasi aset (Pratama dan Pangayow, 2016).

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan (Riyono, 2013) hasil yang didapat dari penelitian itu adalah manajemen barang publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memberikan kontribusi yang nyata untuk menambah PAD. Yang kedua adalah pemanfaatan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun terlihat kurang berhasil karena kontribusi yang diberikan masih sedikit. Yang ketiga pemanfaatan aset yang melalui pinjam pakai dan sewa belum menunjukkan kontribusi terhadap PAD, dikarenakan sifatnya kerjasama. Pola kemitraan dipilih dengan harapan dapat menambah andil terhadap PAD di Provinsi Jawa Timur (Riyono, 2013).

Penelitian (Sundari & Ma'arif, 2013) menyatakan bahwa tanah aset BMD yang digunakan, tidak mempertimbangkan karakteristik dari tanah aset di wilayah sekitarnya. Tanah aset Pemkot Semarang belum dikelola dengan maksimal. inventarisasi/ pendataan, pemeliharaan dan pengamanan belum memberikan manfaat bagi pihak pengelola dan pengguna tanah maupun masyarakat. Penertiban tanah aset di wilayah Kota Semarang dengan adanya perjanjian tertulis agar tidak ada konflik di masa yang akan datang. Sedangkan tanah aset yang belum dimanfaatkan harus dilakukan upaya untuk memanfaatkan aset supaya tidak rugi. Pemanfaatan aset bisa dengan penggunaan tanah sesuai dengan peruntukannya, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga agar tanah aset tersebut dapat memberikan manfaat. (Sundari dan Ma'arif, 2013).

Perbedaan berbagai hasil penelitian tersebut dapat menjadikan salah satu hal yang menarik untuk peneliti melakukan penelitian ini dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat apakah variabel-variabel tersebut mempengaruhi optimalisasi aset dalam hal ini BMD milik Pemda DIY. Dari uraian penelitian ini mengambil judul "Analisis Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta".

Metode Penelitian

Populasi adalah seluruh data yang dijadikan titik perhatian seorang peneliti yang sudah ditetapkan. Populasi sangat berhubungan dengan data, jika seseorang memberikan data, populasinya adalah banyaknya orang (Margono, 2005). PNS yang bekerja di 41 (empat puluh satu) SKPD Pemda DIY menjadi populasi pada penelitian ini.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi (Sugiyono, 2010). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability* sampling yaitu metode *purposive sampling*. Dalam metode tersebut peneliti memilih kriteria yang akan dijadikan sampel. Sampel yang

dipilih adalah yang melakukan pengelolaan BMD dan Kriteria yang akan dijadikan sampel diantaranya:

- a. Staff yang mengetahui tentang manajemen aset dan memiliki wewenang atas aset di SKPD Pemda DIY
- b. Staff yang mengelola barang dengan masa jabatan minimal 1 tahun di SKPD Pemda DIY

Dalam penelitian ini memakai sampel minimal 37 responden. Lokasi studi dalam penelitian ini adalah pengelola aset BMD Di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah staf pada SKPD yang bertanggung jawab terhadap aset atau Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi DIY. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik mengajukan pertanyaan tertutup dengan opsi atau pilihan jawaban yang telah disediakan. Responden hanya perlu memilih jawaban diantara pilihan yang telah disediakan pada kuesioner.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknis analisis data dimana uji statistik yang digunakan adalah mulai dari menguji data yang digunakan, sampai hasil dari hubungan antara variabel dalam penelitian ini. Berikut uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini. Uji validitas yang dilakukan adalah untuk melihat valid atau tidak suatu kuesioner (Gozali, 2009). Kuesioner dapat dinyatakan valid bila pertanyaan dari kuesioner dapat menggambarkan variabel yang akan diuji.

Reliabilitas adalah rangkaian penilaian yang mempunyai kesesuaian jika penilaian yang dikerjakan menggunakan alat hitung yang sama secara berulang (Margono, 2005). Yang dimaksud reliabilitas yaitu besarnya derajat tes dapat menilai secara sesuai tujuan yang dinilai, dinyatakan dalam angka, dan biasanya sebagai koefisien. Jika koefisien dalam pengujian tinggi maka reliabilitasnya juga tinggi. Jadi reliabilitas merupakan tingkat ketepatan suatu alat ukur untuk mengukur instrumen yang harus diukur.

Uji normalitas digunakan untuk melihat tersebarnya data pada sebuah variabel. Adapun hal ini bertujuan untuk menilai apakah data yang digunakan dari variabel tersebut terdistribusi normal. Bila tidak, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap data tersebut. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Multikolinearitas sering terjadi pada diantaranya: regresi linear (sederhana maupun berganda), regresi data panel atau yang lainnya seperti regresi logistik dan *cox regression*.

Heterokedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui adanya ketidakpastian pada residual variabel pada pengujian model regresi linier. Uji tersebut dapat diketahui dengan cara melakukan uji glejser, uji park, maupun uji spearman. Dapat juga dilihat melalui grafik yang menggambarkan persebaran residualnya.

Uji simultal atau uji F digunakan untuk menunjukkan pengaruh seluruh variabel yang digunakan ketika dilakukan uji secara serentak. Bila model yang diuji hasilnya signifikan

maka dapat digunakan untuk memperkirakan, tetapi bila hasil dari uji tersebut tidak signifikan maka model tidak dapat digunakan untuk meramal/ memprediksi.

Uji koefisien korelasi merupakan bilangan yang menentukan besar atau kecilnya hubungan antar dua variabel. Besarnya koefisien korelasi anatara -1 sampai dengan 1. Nilai dari koefisien -1 dan 1 menunjukkan hubungan yang kuat atau sempurna, sedangkan tidak adanya hubungan dapat diketahui melalui nilai koefisiennya yang mendekati 0 bahkan bernilai 0. Hubungan antara 2 variabel dapat ditunjukkan melalui hubungan positif dan negatif. Jika nilai koefisien 0 sampai dengan 1, maka hubungan keduanya positif. sedangkan, hubungan antar variabel dikatakan negatif jika koefisien 0 sampai dengan -1, dan nihil jika koefisiennya 0. Uji parsial atau uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel Y dengan X secara masing-masing. Nilai uji parsial dapat diketahui dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel.

Hasil Dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif. Analisis pada uji tersebut dilakukan dengan mendefinisikan rerata dari setiap indikator variabel penelitian dengan tujuan memberi paparan tentang indikator membentuk model konsep penelitian secara menyeluruh. Berikut ini adalah analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel:

a. Inventarisasi Aset

Variabel inventarisasi dalam penelitian diukur dengan menggunakan 9 item pertanyaan yang menggambarkan indikator dari variabel inventarisasi.

b. Legal Audit

Pada penelitian ini variabel Legal Audit diukur dengan 9 item pertanyaan yang masing-masing mempresentasikan indikator dari variabel legal audit.

c. Penilaian Aset

Pada penelitian ini variabel Penilaian Aset diukur dengan 7 item pertanyaan yang masing-masing mempresentasikan indikator dari variabel ini.

d. Pengawasan dan Pengendalian

Pada penelitian ini variabel Pengawasan dan Pengendalian Aset diukur dengan 10 item pertanyaan yang masing-masing mempresentasikan indikator dari variabel ini.

e. Optimalisasi Aset

Pada penelitian ini variabel Optimalisasi Aset (Y) dihitung dengan 12 item pertanyaan yang mempresentasikan indikator dari variabel Optimalisasi Aset.

Uji validitas instrumen ditunjukkan dari *item-test correlation* atau disebut juga r hitung. Jika nilai dari *item-test correlation* atau r hitung > 0.3246 (r tabel) maka pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid. Begitu juga sebaliknya jika nilai dari *item-test correlation* atau r

hitung < 0.3246 (r tabel) maka pertanyaan pada kuesioner dinyatakan tidak valid. Dari uji validitas yang telah dilakukan ada 3 pertanyaan tidak valid, yaitu 1 pertanyaan dari variabel pengawasan dan pengendalian dan 2 pertanyaan dari variabel optimalisasi aset. ketiga pertanyaan tersebut harus dihilangkan atau dihapus.

Uji reliabilitas adalah menguji konsistensi suatu instrumen dalam penelitian. Instrumen dapat dikatakan baik jika konsisten dengan item yang diukur. Perhitungan reliabilitas instrumen akan diukur menggunakan program komputer Stata.14. nilai reliabilitas ditunjukkan dengan *scale reliability coefficient*, bila nilainya > 0.6 (nilai standarnya) maka variabel dalam penelitian yang digunakan dinyatakan reliable. Dari uji reliabilitas *scale reliability coefficient* sebesar 0.9279, maka variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena $0.9279 > 0.6$ (nilai standar).

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Average interitem covariance	Number of item in the scale	Scale reliability coefficient
0.2637539	52	0.9279

Sumber : data diolah, 2023

Data yang terdistribusi normal dapat dilihat dari uji normalitas. Nilai dari uji normalitas adalah nilai dari Jarque-Bera sebesar $4.662907 > 0.05$, maka dinyatakan normal. Dan nilai probability sebesar $0.097154 > 0.05$, maka dinyatakan normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data Penelitian

Jarque-Bera	Probability
4.662907	0.097154

Sumber : data diolah, 2023

Multikolinearitas adalah adanya hubungan kuat antar variabel independen, seharusnya model regresi yang baik harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Dari uji multikolinearitas nilai dari VIF dan $1/VIF$, jika nilai VIF < 10 dan nilai $1/VIF > 0.1$ artinya model regresi linier berganda tidak terdeteksi gejala multikolinearitas. Masing - masing variabel pada tabel dibawah nilainya VIF kurang dari 10 dan nilai $1/VIF$ lebih dari 0.1, jadi gejala multikolinearitas tidak terdeteksi pada penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
X2	4.24	0.236104
X1	2.54	0.393979
X3	2.43	0.411200
X4	2.85	0.539896
Mean VIF	2.76	

Sumber: data diolah, 2023

Dalam uji regresi linier berganda harus memiliki sifat homokedastisitas. Pada metode Breusch-Pagan, dinyatakan tidak ada gejala heterokedastisitas jika nilai P value pada $Prob > Chi2 > 0.05$. Pada Tabel 4, terlihat bahwa nilai $Prob > Chi2$ sebesar 0.1533 lebih besar dari 0,05, ini menunjukkan bahwa pada model regresi linier berganda terbebas dari gejala heterokedastisitas.

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas Menggunakan Metode Breusch-Pagan

Chi2 (1)	Prob > Chi2
2.04	0.1533

Sumber : data diolah, 2023

Koefisien Determinasi 0.7118, artinya semua variabel independent dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 71.18% dan sisanya sebesar 28.82% (100% - 71.18%) dipengaruhi variabel yang tidak terdapat dalam model.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Number of obs	F (4, 32)	Prob > F	R-Square	Adj R-Square	Root MSE
37	19.76	0.0000	0.7118	0.6758	2.2334

Sumber : data diolah, 2023

Uji parsial dilakukan agar diketahui apakah ada yang mempengaruhi variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, asumsinya yang lainnya tetap. Cara melakukan uji t yaitu melihat nilai dari t hitung dengan t tabel.

Tabel 6. Uji Parsial

No	Variabel	t- hitung	t-tabel	P > [t]	Keterangan
1	Inventarisasi Aset (X1)	0.10	1.69389	0.918	Tidak Signifikan
2	Legal Audit (X2)	2.64	1.69389	0.013	Signifikan
3	Penilaian Aset (X3)	0.23	1.69389	0.820	Tidak Signifikan
4	Pengawasan dan Pengendalian (X4)	2.66	1.69389	0.007	Signifikan

Sumber : data diolah, 2023

Analisis dari uji t sesuai dengan tabel diatas sebagai berikut:

- Nilai t hitung (0.10) < t tabel (1.69389) yaitu variabel inventarisasi (X1) tidak signifikan, karena tingkat signifikansinya > 0.05 atau *p value* (0.918) > 0.05. Dari tabel diatas maka pernyataan *hipotesis 1 ditolak*.
- Nilai dari t hitung (2.64) > t tabel (1.69389) yaitu variabel legal audit (X2) signifikan, karena tingkat signifikansinya < 0.05 atau *p value* (0.013) < 0.05. Artinya variabel legal audit (X2) mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Optimalisasi Aset (Y). Dari tabel diatas maka pernyataan *hipotesis 2 diterima*.

- c. Nilai dari t hitung (0.23) $<$ t tabel (1.69389) yaitu variabel penilaian aset (X_3) tidak signifikan, karena tingkat signifikansinya $>$ 0.05 atau p value (0.820) $>$ 0.05 . Artinya variabel penilaian aset (X_1) tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Optimalisasi Aset (Y). Dari tabel diatas maka pernyataan *hipotesis 3 ditolak*.
- d. Nilai dari t hitung (2.66) $>$ t tabel (1.69389) yaitu variabel pengawasan dan pengendalian (X_4) signifikan, karena tingkat signifikansinya $<$ 0.05 atau p value (0.007) $<$ 0.05 . Dapat dikatakan bahwa optimalisasi asset dipengaruhi oleh pengawasan dan pengendalian asset.

Hasil pengujian terhadap variabel inventarisasi memperlihatkan tidak adanya pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi aset Pemda DIY. Diperoleh t hitung 0.10 dengan tingkat signifikansi 0.918 , memperlihatkan t hitung tidak signifikan dikarenakan tingkat signifikansi yang didapat $>$ 0.05 . Artinya variabel Inventarisasi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Optimalisasi Aset.

Dilihat dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 pasal 27 dijelaskan dalam pelaksanaan serta penggunaan barang perlu dilakukan sensus terhadap BMD dengan jangka 5 tahun sekali. Hal tersebut bertujuan untuk penyusunan buku inventaris dan buku induk inventaris serta rekapitulasi BMD. Namun inventarisasi ini tidak mempengaruhi optimalisasi aset karena hanya melakukan pendataan terhadap Barang Milik Daerah saja bukan untuk mereka penggunaan barang. Jadi inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah tidak mempengaruhi Optimalisasi Aset Pemda DIY.

Hasil pengujian terhadap variabel legal audit menunjukkan bahwa legal audit mempengaruhi optimalisasi aset Pemda DIY. Besarnya nilai t hitung 2.64 dengan tingkat signifikansi 0.013 , menunjukkan t hitung signifikan di tingkat signifikansi yang didapatkan $<$ 0.05 .

Dikarenakan terdapat banyak permasalahan mengenai legal audit yaitu lemahnya status penguasaan, pihak ketiga menguasai aset, atau pemindah tanganan yang tidak diawasi maka legal audit sangat diperlukan. Dengan dilakukannya legal audit permasalahan yang terjadi akan teratasi dan Barang Milik Daerah atau aset Pemda DIY akan kembali dimiliki dengan status kepemilikan Pemda DIY. Selanjutnya Barang Milik Daerah atau aset Pemda yang sudah jelas status kepemilikannya dapat dimanfaatkan oleh Pemda DIY, dan dapat meningkatkan Optimalisasi Aset Pemda DIY. Jadi Legal Audit mempengaruhi secara positif terhadap Optimalisasi Aset Pemda DIY.

Hasil uji terhadap variabel penilaian aset menunjukkan bahwa inventarisasi tidak mempengaruhi optimalisasi aset Pemda DIY. Diperoleh t hitung 0.23 dan tingkat signifikansi 0.820 , menunjukkan bahwa t hitung tidak signifikan karena tingkat signifikansi yang diperoleh $>$ 0.05 .

Dilihat dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pasal 52, Penilaian BMD berwujud tanah dan bangunan dilakukan agar memperoleh harga yang sesuai perkiraan paling rendah dengan berpedoman pada NJOP. Penilaian hanya dilakukan untuk menilai suatu aset saja bukan untuk pemanfaatan yang aset yang akan memberikan hasil. Jadi penilaian tidak berpengaruh terhadap Optimalisasi Aset milik Pemda DIY.

Hasil pengujian terhadap variabel pengawasan dan pengendalian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengawasan dan pengendalian terhadap optimalisasi aset Pemda DIY. Nilai t hitung 2.66 dan tingkat signifikansi 0.007, bahwa t hitung signifikan karena tingkat signifikansi yang diperoleh < 0.05 . Artinya Pengawasan dan Pengendalian mempengaruhi variabel Optimalisasi Aset.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 pasal 82 (3) disebutkan pemakai barang memantau serta menertibkan pemakaian BMD. Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud adalah dengan memantau dan menertibkan BMD. Dengan dilakukannya pemantauan dan penertiban terhadap BMD maka aset milik Pemda DIY akan dikelola dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama and Pangayow, 2016) yang dilakukan untuk mengetahui tentang pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset daerah pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura dan variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel persediaan dan penilaian aset tidak memiliki pengaruh terhadap optimalisasi aset. Pada saat yang sama, variabel legal audit dan pemantauan dan pengendalian aset mempengaruhi optimalisasi aset. Berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa variabel yang digunakan terbukti mempengaruhi optimalisasi aset. Hasil tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian serta legal audit memiliki pengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah Inventarisasi tidak signifikan terhadap Optimalisasi Aset Pemda DIY. Yang kedua, Legal Audit mempengaruhi Optimalisasi Aset Pemda DIY. Yang ketiga, Penilaian Aset tidak mempengaruhi Optimalisasi Aset Pemda DIY. Yang keempat, optimalisasi aset pemda DIY dipengaruhi oleh pengawasan dan pengendalian aset. Pemda DIY perlu meningkatkan pentingnya faktor Legal Audit, yang diyakini akan memiliki dampak yang signifikan pada upaya Optimalisasi Aset Pemda DIY. Melalui peningkatan dalam proses Legal Audit, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam status kepemilikan aset yang dimiliki oleh Pemda DIY. Dengan demikian, Optimalisasi Aset Pemda DIY juga diharapkan akan mengalami peningkatan yang sejalan. Pemda DIY diharapkan mampu memperketat Pengawasan dan Pengendalian terhadap aset mereka, sehingga aset yang dimiliki tetap terjaga dan dimanfaatkan secara efisien. Selain itu, dengan meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian, Pemda DIY akan lebih mampu mencegah kehilangan aset yang dimiliki mereka.

Daftar Pustaka

- Adisamita, R. (2010). *Pembangunan Kota Optimum, Efisien dan Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Annisa, M. & Khoirudin, R. (2022). Determinan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 6(2), 1-13.
- Antoh, E. (2017). Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Studi Di Kabupaten Paniiiai). *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 1(2), 37-47.
- Asmaan, A., Akram, H., & Alamsyah. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Assets*, 6(1), 23-38.
- Aulia, R.N. & Khoirudin, R. (2022). Optimalisasi Aset Dengan Metode Highest And Best Use (Studi Kasus Di Jalan Prambanan-Piyungan). *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(01 Maret), 13–20.
- Dametouw, M., Agustinus, A., & Meinarni, A. (2016). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(2), 1-12.
- Eriyanto, Y. D. (2006). *Pengelolaan Sumber Air bersih secara Partisipatif di Gunung Merbabu*. Semarang: Tugas Akhir tidak diterbitkan. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Jamaludin. (2017). Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, Dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Milik Pemerintah Provinsi NTB. *Jurnal Sekuritas*, 1(1), 34-58.
- Jusmin, & Nurrsalim. (2018). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan) Pemerintah Kabupaten Sorong. *Jurnal Equilibrium*, 6(2), 139-147.
- Lawrence, R. J. (2003). Human ecology and its applications. *Science Direct*, 31-40.
- Margono. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Bineka Cipta.
- Nasution, E., Harmein, N., & Yeni, A. (2015). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatra Utara. *Jurnal Ekonom*, 18(1), 10-18.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
- Pratama, R., & Pangayow, B. (2016). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah (Studi tentang pola kemitraan asset tanah pemerintah Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 237-245.
- Riyono, S. (2013). Pemanfaatan Aset Daerah (Studi tentang pola kemitraan asset tanah Pemerintah Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 33-51.
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjono, G., R.M, N. B., & Nadiasa, M. (2014). Analisis Faktor Kinerja Pengelolaan Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Spektran*, 28-35.

-
- Sundari, M., & Ma'arif, S. (2013). Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(2), 163-173.
- Wahyuni, S., & Khoirudin, R. (2015). Analisis Optimalisasi Aset Pada Terminal Menggala Di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 79-92.
- Wahyuni, S., Khoirudin, R., Irawati, N. & Nugroho, A.A. (2020). Evaluasi Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah dengan Analisis Cost and Benefit (CBA) pada Stadion Mandala Krida Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 4(1), 11-22.
- Widiantri, N., & Jayantiari, I. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Negara*, 5(4), 1-5.